



Kejari Tunggu Audit BPKP

■ Dalami Empat Kasus Korupsi

SINTANG, TRIBUN - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali, memastikan, tidak ada penghentian dugaan kasus korupsi tiga proyek besar di Sintang dan Melawi. Menurut Kajari, saat ini pihaknya masih menunggu Laporan Hasil Investigasi (LHI) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait kerugian negara.

"Kita sudah konsultasikan di BPK mengenai tiga proyek yang berjalan, dan kita tunggu hasil investigasinya dari BPK," jelas Kajari Djumali, Selasa (21/5).

Kajari Moch Djumali mengungkapkan tiga proyek fisik yang saat ini sedang diselidiki di antaranya pembangunan Dermaga Serawai, Pasar Masuka, dan Rumah Sakit Rujukan. Sedangkan di BPKP, Kejari juga mengkonsultasikan kasus Nice di Kabupaten Sintang.

"Untuk proyek Pasar Masuka ini sudah *inklud* di dalamnya Pasar Senaning, dan Pasar Merakai. Semuanya sedang diselidiki," jelas Kajari.

Dari beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani, Djumali mengungkapkan, sudah keluar laporan investigasinya di BPKP yakni kasus pembangunan GOR Melawi. Hasil investigasi memang ada kerugian negara sebesar Rp 1.975.964.111.90 dari Rp 9 miliar anggaran.

"Saya sudah minta kepada BPKP untuk segera mengeluarkan penetapan kerugian negara, sehingga kita bisa melakukan penetapan tersangka dan proses penyidikan," katanya.

Kendati sudah memiliki LHI yang mengarah kepada tindak korupsi, Kajari, masih



TRIBUN/DOK Kajari Sintang

” Saya sudah minta BPKP mengeluarkan penetapan kerugian negara, sehingga kita bisa menetapkan tersangka dan proses penyidikan.” ”

MOCH DJUMALI

enggan menyebutkan nama tersangka dalam kasus tersebut. Dia akan menetapkan tersangka setelah keluarnya penetapan kerugian negara.

"Sebenarnya sudah ada tersangka cuma belum kita tetapkan, menunggu penetapan jumlah kerugian negara dari BPKP. Nama atau inisial tersangka belum bisa kita kasih, yang pasti semuanya orang Melawi bukan dari daerah lain," ungkap Djumali.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Andi Yul Lapawesean, mengungkapkan juga sedang menunggu LHI dari BPKP tentang dugaan korupsi pembangunan jalan sepanjang 19,4 kilometer di Sintang.

"BPKP, Dinas PU Propinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Sintang dan penyidik tipikor Polres Sintang sudah melakukan investigasi di lapangan. Kemungkinan besar ada temuan kerugian negara, dan saat ini kita masih menunggu LHI nya," jelas Kasat.

Ketua Komisi 1 DPRD Sintang, Ginidie mengungkapkan, semua pihak boleh melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan melaporkan adanya tindakan korupsi yang merugikan negara.

"Termasuk masyarakat punya hak menyikapi permasala-

han dugaan korupsi tersebut. Bila ada data dan bukti, laporkan ke kejaksaan maupun kepolisian," tukas Ginidie.

Menurutnya, bila ditemukan adanya indikasi korupsi, maka kejaksaan harus menindaklanjuti dengan mencari data dan bukti pendukung. "Bila semuanya lengkap, tak ada kata pembiaran. Kendati untuk pembuktian korupsi ini cukup sulit," tandas Ginidie.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) mempertanyakan kinerja Kejari Sintang. Pasalnya, sejumlah kasus korupsi, diduga "diam di tempat". "Jangan jauh-jauh, bangunan gedung DPRD dan rumah sakit rujukan itu sudah jelas. Kenapa tak disentuh, malah kasus korupsi di Melawi yang digembarkan. Ada apa ini?," tukas Presiden Lira, Abdul Hadi, belum lama ini.

Abdul Hadi menyatakan kasus korupsi di Kabupaten Sintang cukup besar, akan tetapi penanganan Kejari dinilainya tak serius. Menurutnya, penanganan kasus korupsi seakan tak berimbang. Selama ini hanya kasus korupsi di Melawi yang ditangani, sementara di Sintang seolah ada pembiaran. (acu)